

THE IMPACT OF GOVERNMENT EXPENDITURE, INVESTMENT, AND UNEMPLOYMENT ON INDONESIA'S GROWTH: ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE

Nurjannah Anggraini^{*1},

^{*}korespondensi

Email*: nurjanahaja693@gmail.com

¹ Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

Ridwansyah²,

² Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

Ujang Hanief Musthofa³

³ Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

History of Article : received June 2026, accepted June 2026, published June 2026

Abstract - This study aims to analyze the influence of government expenditure, investment, and the open unemployment rate on economic growth across 34 provinces in Indonesia during the 2020–2024 period. A quantitative approach using panel data methodology was applied, utilizing secondary data sourced from the Central Bureau of Statistics (BPS) and the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK). Data analysis was conducted through panel data regression using EViews 9 software, with the Fixed Effect Model (FEM) selected as the best-fit model. The results indicate that, partially, government expenditure has no significant effect on economic growth. Conversely, investment has a positive and significant impact, while the open unemployment rate has a negative and significant effect on economic growth. From an Islamic economic perspective, economic growth should not be oriented solely toward increasing material output but must also encompass the creation of justice, balance, and general welfare (*maslahah*) for the entire society.

Keywords: Government Expenditure; Investment; Open Unemployment Rate; Economic Growth; Islamic Economics

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja negara, investasi, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi di 34 provinsi di Indonesia selama periode 2020–2024. Pendekatan kuantitatif dengan metode data panel diterapkan dalam penelitian ini, menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Analisis data dilakukan melalui regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak EViews 9, dan model terbaik yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, belanja negara tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, investasi berpengaruh positif dan signifikan, sementara tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif ekonomi Islam, pertumbuhan ekonomi tidak sekadar berorientasi pada peningkatan *output* material, tetapi juga harus mencakup terciptanya keadilan, keseimbangan, serta kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.

Kata Kunci: Belanja Negara; Investasi; Tingkat Pengangguran Terbuka; Pertumbuhan Ekonomi; Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator krusial dalam menilai keberhasilan pembangunan

suatu negara karena merefleksikan peningkatan kapasitas produksi nasional yang berdampak langsung terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai proses kenaikan pendapatan nasional yang berlangsung secara berkelanjutan serta mencerminkan dinamika aktivitas ekonomi dari waktu ke waktu (Inayah, 2023). Dalam perspektif *modern economic growth*, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan *output* per kapita dalam jangka panjang, yang tercermin dari kenaikan produksi barang dan jasa serta daya beli masyarakat. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 2020–2024 menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2020, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 2,07% sebagai dampak pandemi COVID-19 yang melumpuhkan berbagai sektor ekonomi nasional. Namun, memasuki periode pascapandemi (2021–2024), pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren pemulihan dengan rata-rata laju sekitar 5%. Kendati demikian, tingkat stabilitas pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya tercapai, yang mengindikasikan bahwa ekonomi Indonesia masih rentan terhadap tekanan eksternal maupun domestik. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan memerlukan dukungan kebijakan strategis melalui penguatan investasi, efektivitas pengelolaan belanja negara, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (Amdan & Sanjani, 2023).

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai variabel, antara lain tingkat pengangguran terbuka, investasi, serta kondisi pasar. Melalui pendanaan pada sektor pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, investasi pemerintah memainkan peran vital dalam mendorong pertumbuhan nasional. Selain itu, investasi memiliki posisi strategis dalam meningkatkan aktivitas ekonomi dan memperluas kapasitas produksi (Iriawan & Usaid, 2026). Di sisi lain, kemampuan ekonomi dalam menyerap tenaga kerja masih tercermin dari tingkat pengangguran terbuka yang fluktuatif (Dewi & Setiawina, 2023). Selain itu, pemerintah mengalokasikan dana yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi melalui investasi publik, pembangunan infrastruktur, serta penyediaan layanan sosial bagi masyarakat (Tasmilah, 2021).

Ekonomi pembangunan memiliki keterikatan teoretis yang kuat dengan model Harrod-Domar dan pemikiran Neo-Klasik. Berdasarkan teori pertumbuhan Robert Solow (Neo-Klasik), kemajuan ekonomi merupakan hasil dari akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja, serta inovasi teknologi yang secara kolektif meningkatkan produktivitas serta efisiensi sistem ekonomi (Amdan & Sanjani, 2023). Teori Harrod-Domar, di sisi lain, menyoroti pentingnya investasi selaku aspek yang menunjang pembangunan ekonomi berkepanjangan dengan mendesak penciptaan modal serta kenaikan kapasitas penciptaan (Amin et al., 2024; Dumo et al., 2023). Oleh sebab itu, daya guna kebijakan pemerintah, kegiatan investasi, serta kemajuan teknologi dalam mendesak kegiatan ekonomi seluruhnya berakibat pada perkembangan ekonomi di samping kenaikan penciptaan nasional.

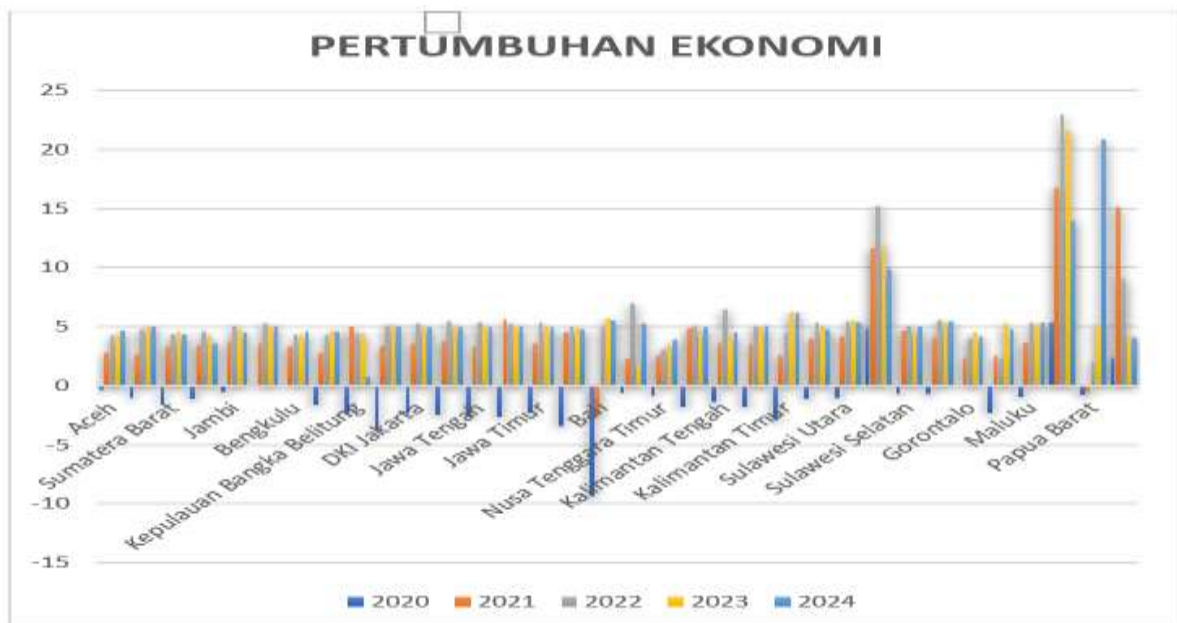
Secara teoritis, tenaga kerja, investasi, serta pengeluaran pemerintah seluruhnya berkontribusi secara signifikan terhadap perkembangan ekonomi, namun penemuan riset aktual silih berlawanan. Bagi riset Sadli et al. (2022), pembangunan ekonomi Indonesia dipengaruhi secara positif serta signifikan oleh investasi serta pengeluaran pemerintah. Penemuan seragam pula dilaporkan oleh Martinus & Budiman (2024), yang melaporkan kalau pengeluaran serta investasi pemerintah secara signifikan mendorong perkembangan ekonomi Indonesia. Tetapi, pengeluaran pemerintah dalam hal investasi bisa diabaikan untuk perkembangan ekonomi, bagi riset Huwaida et al. (2023), sebaliknya investasi tidak mempunyai akibat yang nyata terhadap perkembangan ekonomi, sesuai dengan riset Ganar et al. (2021). Variasi hasil dalam berbagai studi terdahulu menunjukkan bahwa pengaruh investasi dan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi masih menunjukkan ambiguitas empiris. Merespons kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pengaruh belanja negara yang diprosikan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) serta investasi (PMDN) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap pertumbuhan ekonomi di 34

provinsi di Indonesia selama periode 2020–2024. Melalui pendekatan ekonomi Islam, penelitian ini berupaya memberikan perspektif baru dalam mengevaluasi efektivitas instrumen ekonomi tersebut dalam menciptakan kemaslahatan masyarakat. Perkembangan ekonomi dimungkinkan dari sudut pandang Islam bila seluruh pembedahan ekonomi dicoba cocok dengan prinsip-prinsip syariah, yang berasal dari Al-Quran serta Sunnah. Islam menempatkan keadilan dalam alokasi kekayaan selaku aspek berarti dalam menghindari ketidakadilan sosial di warga, daripada cuma berfokus pada kenaikan produktivitas ataupun pemasukan.

﴿٣١﴾ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
Artinya : “Orang-orang yang menghambur-hamburkan harta mereka di jalur Allah itu semacam (orang yang menabur) sebatang biji yang berkembang 7 tangkai, serta tiap tangkainya menciptakan seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) untuk siapa juga yang Ia kehendaki. Allah Maha Meliputi lagi Maha Mengenal.”. (QS. Al-Baqarah: 261).

Ayat ini menyiratkan kalau kekayaan yang dikelola serta didistribusikan di jalur Allah hendak bawa berkah serta khasiat untuk kehidupan manusia. Dengan demikian, perkembangan ekonomi dalam Islam tidak cuma berorientasi pada kesejahteraan modul, namun pula pada kesejahteraan spiritual serta distribusi kekayaan yang adil. Pemikiran ini sejalan dengan riset perkembangan ekonomi dari perspektif ekonomi Islam, yang menarangkan kalau pembangunan ekonomi tidak cuma bertujuan buat tingkatkan penciptaan namun pula buat mewujudkan keadilan, kesetaraan, serta kesejahteraan lewat pengelolaan zona ekonomi yang produktif serta berkepanjangan (Satria et al., 2023). Dalam konteks ini, perkembangan ekonomi ditetapkan oleh bermacam aspek ekonomi yang silih terpaut, semacam pengeluaran pemerintah, investasi, serta tingkatan pengangguran terbuka. Sebagian riset lebih dahulu sudah menampilkan hasil yang bermacam-macam menimpa pengaruh variabel-variabel ini terhadap perkembangan ekonomi. Lebih lanjut, perkembangan ekonomi Indonesia yang berfluktuasi menampilkan kalau stabilitas perkembangan ekonomi masih belum tentu. Perihal ini jadi tantangan dalam pembangunan nasional. Oleh sebab itu, riset ini butuh dicoba buat menganalisis pengaruh pengeluaran negeri, investasi, serta tingkatan pengangguran terbuka terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia.

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi

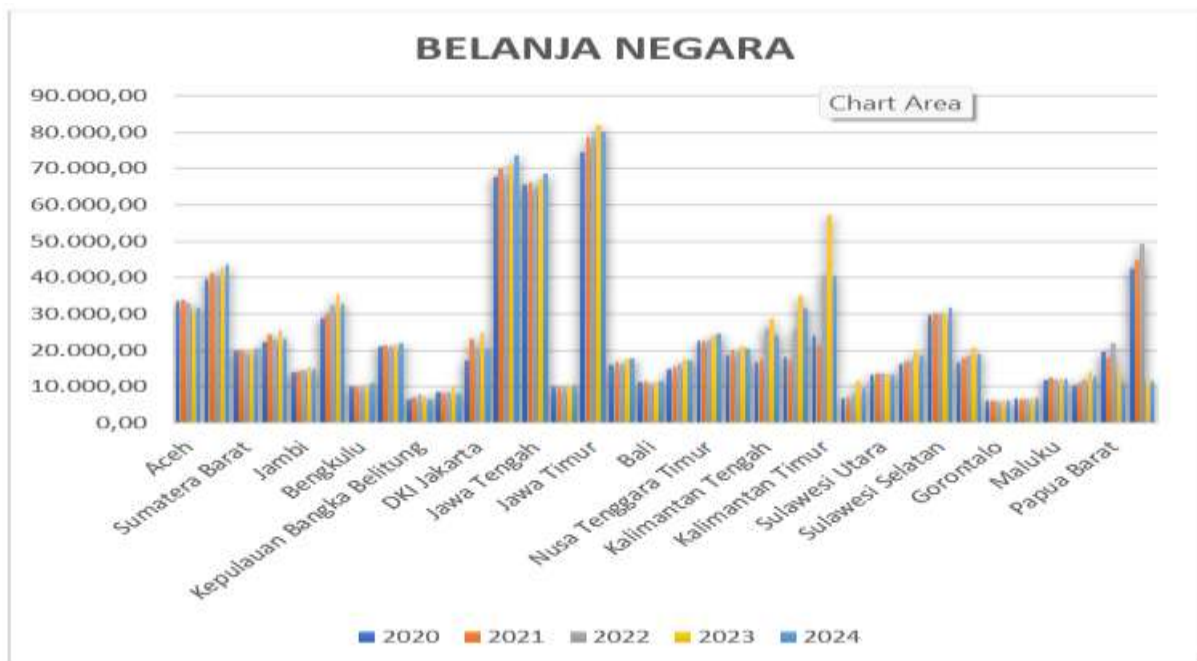


Sumber : BPS Indonesia, 2026

Analisis data pertumbuhan ekonomi 34 provinsi di Indonesia sepanjang periode 2020–2024 menunjukkan adanya fluktuasi yang cukup tajam antarwilayah. Dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2020 memicu kontraksi ekonomi di sebagian besar provinsi, yang dipicu oleh penurunan drastis pada aktivitas produksi, konsumsi, investasi, serta terbatasnya mobilitas penduduk. Provinsi Bali tercatat mengalami kontraksi terdalam dengan angka sebesar -9,34%. Sebaliknya, beberapa daerah justru menunjukkan ketahanan ekonomi dengan mempertahankan pertumbuhan positif, di antaranya Sulawesi Tengah (4,86%), Maluku Utara (5,39%), serta Papua (2,39%).

Memasuki tahun 2021 hingga 2022, perekonomian di sebagian besar provinsi mulai mengalami pemulihan yang ditunjukkan oleh meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini didorong oleh membaiknya aktivitas ekonomi, peningkatan investasi, serta berbagai kebijakan pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi. Memasuki periode 2023–2024, laju pertumbuhan ekonomi nasional cenderung mencapai titik stabil, kendati disparitas kinerja antardaerah masih cukup nyata. Beberapa wilayah, seperti Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua Barat, konsisten mencatatkan laju pertumbuhan di atas rata-rata nasional. Secara makro, data ini mengonfirmasi bahwa akselerasi ekonomi Indonesia masih menghadapi tantangan ketimpangan antarwilayah yang dipicu oleh kompleksitas faktor ekonomi setempat. Oleh sebab itu, diperlukan sinergi kebijakan pemerintah yang lebih terarah, mencakup optimalisasi iklim investasi serta perluasan lapangan kerja, guna memastikan terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di seluruh provinsi di Indonesia.

Gambar 2. Realisasi Belanja Negara (TKDD)



Sumber : DJPK, 2026

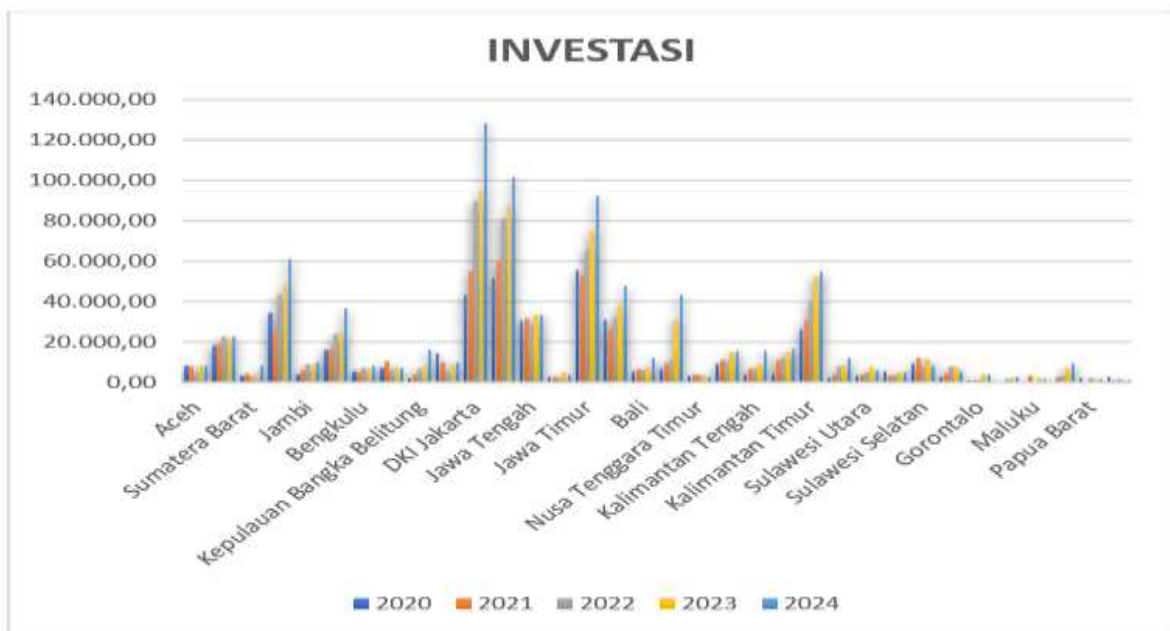
Berdasarkan tren data belanja negara yang diprosikan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di tingkat provinsi, terlihat adanya fluktuasi dalam perkembangan alokasi fiskal selama periode 2020–2024. Meskipun terdapat variasi antarwilayah, secara umum terjadi peningkatan alokasi belanja di sebagian besar provinsi. TKDD berfungsi sebagai instrumen fiskal strategis pemerintah pusat untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mencakup pembiayaan

pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik (Hutahaean, 2019). Alokasi belanja pemerintah memegang peranan krusial sebagai stimulus utama dalam memacu dinamika ekonomi sekaligus memelihara stabilitas makroekonomi melalui implementasi berbagai program pembangunan strategis.

Pada periode 2020–2021, alokasi TKDD di berbagai provinsi mengalami penyesuaian sebagai respons terhadap pandemi COVID-19, terutama untuk sektor kesehatan, bantuan sosial, dan pemulihan ekonomi. Memasuki periode 2022–2024, terjadi tren peningkatan alokasi TKDD pada mayoritas daerah, sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional serta meningkatnya urgensi kebutuhan pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Provinsi-provinsi di Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, secara konsisten menempati posisi penerima alokasi TKDD terbesar. Fenomena ini didorong oleh signifikansi jumlah populasi serta skala kebutuhan layanan publik yang masif di wilayah tersebut.

Secara umum, peningkatan TKDD mencerminkan semakin kuatnya peran pemerintah dalam mendorong aktivitas ekonomi dan pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan Adli et al., (2022) yang menyatakan bahwa peningkatan alokasi pengeluaran pemerintah secara empiris menunjukkan kontribusi signifikan dalam memperkuat dinamika aktivitas ekonomi nasional. Namun demikian, efektivitas penggunaan anggaran menjadi faktor penting dalam menentukan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi (Shabira & Amri, 2023). Sementara penyerapan anggaran yang belum optimal dapat menurunkan efektivitas belanja pemerintah (Tambunan & Amin, 2019).

Gambar 3. Investasi (PMDN)



Sumber : BPS Indonesia, 2026

Berdasarkan tren data Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di 34 provinsi selama periode 2020–2024, terlihat adanya pola fluktuatif dengan kecenderungan peningkatan yang berkelanjutan. PMDN, sebagai bentuk investasi yang dilakukan oleh investor domestik, memegang peranan krusial dalam memperkuat kapasitas produksi, penyerapan tenaga kerja, serta memacu laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pada tahun 2020, realisasi PMDN di mayoritas provinsi mengalami perlambatan signifikan sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang menekan aktivitas ekonomi dan menurunkan kepercayaan investor. Kendati demikian, sepanjang tahun 2021 hingga 2024, banyak daerah mencatatkan pemulihan dan peningkatan realisasi investasi. Beberapa wilayah, seperti DKI

Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Riau, serta Kalimantan Timur, secara konsisten membukukan nilai investasi yang lebih unggul dibandingkan provinsi lainnya.

Di sisi lain, disparitas investasi terlihat pada wilayah Indonesia Timur, di mana provinsi seperti Maluku, Papua Barat, dan Papua mencatatkan realisasi PMDN yang cenderung lebih rendah dibandingkan wilayah lainnya. Tren peningkatan nilai PMDN di berbagai provinsi mengindikasikan adanya pemulihan aktivitas ekonomi sekaligus penguatan keyakinan investor domestik terhadap prospek pasar daerah. Temuan ini selaras dengan argumen Ganar et al. (2021) yang menegaskan bahwa investasi memiliki peranan fundamental dalam mengakselerasi kapasitas produksi serta menstimulasi penguatan aktivitas di sektor riil. Senada dengan hal tersebut, Septiana et al. (2023), menegaskan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan determinan krusial dalam memacu pembangunan serta pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah. Secara komprehensif, tren PMDN menunjukkan pertumbuhan yang berkelanjutan di sebagian besar wilayah selama periode observasi. Kendati demikian, pola distribusi investasi yang masih timpang antarwilayah mengisyaratkan bahwa dampak positif dari aliran investasi tersebut belum terdistribusi secara merata di seluruh penjuru daerah. Sulistiawati (2012), mengemukakan bahwa investasi berperan sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi melalui ekspansi *output* serta perluasan lapangan kerja. Perspektif tersebut diperkaya oleh temuan Zaharani & Nasir (2025) yang menekankan bahwa efektivitas investasi terhadap pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kualitas investasi itu sendiri, serta kapasitas institusional daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan aliran investasi secara produktif.

Gambar 4. Tingkat Pengangguran Terbuka



Sumber : BPS Indonesia, 2026

Berdasarkan tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di 34 provinsi selama periode 2020–2024, secara umum terlihat adanya pola penurunan yang konsisten di mayoritas wilayah. Pada tahun 2020, angka pengangguran sempat mencapai titik puncak akibat disrupsi pandemi COVID-19 yang memicu kontraksi ekonomi, lonjakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), serta kontraksi peluang kerja. Provinsi-provinsi dengan pusat industri yang padat karya, seperti DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Kepulauan Riau, terpantau mencatat tingkat pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain, yang merefleksikan kerentanan sektor-sektor tersebut terhadap guncangan ekonomi. Namun, seiring

dengan akselerasi pemulihan ekonomi nasional, TPT pada sebagian besar provinsi menunjukkan tren perbaikan sepanjang tahun 2021 hingga 2024. Penurunan ini mengindikasikan efektivitas reaktivasi aktivitas ekonomi dalam mendorong penyerapan tenaga kerja secara bertahap. Damanik & Damanik (2023) mengemukakan bahwa angka pengangguran merupakan variabel krusial dalam mencerminkan kinerja perekonomian, mengingat signifikansinya terhadap efektivitas pasar kerja dalam mengabsorpsi angkatan kerja. Pandangan tersebut diperluas oleh Pitri et al. (2024) yang menyatakan bahwa korelasi antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi bersifat kompleks dan tidak selalu linier, karena sangat bergantung pada dinamika kondisi ekonomi makro, rigiditas struktur pasar tenaga kerja, serta karakteristik spesifik dari setiap daerah. Bersamaan dengan proses pemulihan ekonomi, tingkat pengangguran yang menurun diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan aktivitas ekonomi daerah.

Selain itu, tingkat pengangguran juga dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, serta kemampuan daerah dalam menciptakan lapangan kerja baru. Neno et al. (2024) mengemukakan fenomena bahwa akselerasi pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis berbanding lurus dengan penurunan tingkat pengangguran, terutama jika laju penambahan angkatan kerja melampaui kapasitas penciptaan lapangan pekerjaan. Sejalan dengan perspektif tersebut, Kusuma & Purnomo (2024) menekankan dampak negatif dari tingginya angka pengangguran, yang mencakup penurunan produktivitas tenaga kerja, pelemahan daya beli masyarakat, serta terhambatnya laju pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pengendalian tingkat pengangguran menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Dalam teori ekonomi, pengeluaran negeri ialah bagian dari kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah buat melindungi stabilitas ekonomi serta menunjang perkembangan ekonomi. Anggaran negeri mencakup bermacam pengeluaran pemerintah, tercantum di zona infrastruktur, pembelajaran, kesehatan, subsidi, serta pelayanan publik yang bertujuan buat tingkatkan kesejahteraan warga (Lubis et al., 2025). Dengan tingkatkan pengeluaran negeri, pemerintah bisa berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja, menguatkan energi beli warga, serta tingkatkan kegiatan ekonomi nasional (Martinus & Budiman, 2024). Dalam teori Keynesian, kenaikan pengeluaran negeri berpotensi mendorong perkembangan ekonomi. Strategi ekspansi belanja pemerintah diimplementasikan sebagai upaya untuk memperkuat daya beli publik, mengoptimalkan tingkat konsumsi, serta meningkatkan produktivitas sektor riil, yang secara agregat akan menstimulasi akselerasi pertumbuhan ekonomi (Sadli et al., 2022). Lebih lanjut, bagi teori Musgrave, pengeluaran negeri mempunyai guna alokasi, distribusi, serta stabilisasi yang berfungsi dalam sediakan sarana publik, distribusi kesejahteraan yang adil, serta melindungi stabilitas ekonomi (Lubis et al., 2025). Peningkatan belanja pemerintah tersebut diproyeksikan mampu memacu kegiatan ekonomi serta mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

H1: Pengeluaran pemerintah diproyeksikan memiliki kontribusi yang positif dan signifikan dalam mengakselerasi laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Dalam teori ekonomi, investasi didefinisikan selaku kegiatan menginvestasikan modal buat tingkatkan kapasitas penciptaan serta mendapatkan keuntungan di masa depan. Investasi memainkan kedudukan berarti dalam mendesak perkembangan ekonomi sebab sanggup menaikkan modal, memperluas peluang kerja, serta tingkatkan output nasional (Kusuma & Anwar, 2023). Lebih lanjut, investasi merupakan komponen kunci yang mendorong pembangunan ekonomi nasional dengan cara meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan pemerataan kesejahteraan (Manullang et al., 2024). Dalam teori Harrod-Domar, tingkatan pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh jumlah tabungan serta kegiatan investasi. Investasi berperan menaikkan modal, memperluas keahlian

penciptaan, serta sediakan peluang kerja, sehingga bisa menunjang pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Menurut teori Neoklasik, investasi berperan vital dalam akumulasi modal, efisiensi produktivitas, dan implementasi teknologi canggih, yang pada akhirnya menstimulasi pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Peningkatan arus investasi secara langsung berkontribusi dalam mengakselerasi produktivitas pada sektor barang dan jasa. Mekanisme ini secara simultan mendorong kenaikan pendapatan riil masyarakat sekaligus mengintensifkan dinamika kegiatan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, investasi dikira mempunyai pengaruh positif terhadap perkembangan ekonomi (Ganar et al., 2021).

H2: Investasi diproyeksikan memberikan kontribusi yang signifikan serta berdampak positif terhadap akselerasi laju pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia

Secara teoretis, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) didefinisikan sebagai rasio angkatan kerja yang belum terserap oleh pasar tenaga kerja, namun tetap menunjukkan upaya aktif dalam mencari pekerjaan atau sedang dalam proses merintis usaha (Yunita & Putri, 2026). Indikator ini mencerminkan adanya ketimpangan antara suplai angkatan kerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan dalam suatu sistem perekonomian. Meningkatnya tingkatan pengangguran menampilkan ketidakseimbangan yang terus menjadi besar di pasar tenaga kerja yang berpotensi mempengaruhi perkembangan ekonomi serta tingkatan kesejahteraan warga (Abimayu et al., 2024). Tidak hanya itu, meningkatnya pengangguran pula berpotensi kurangi produktivitas tenaga kerja serta melemahkan kegiatan ekonomi warga (Ananda et al., 2024). Menurut perspektif teori klasik, fenomena pengangguran dipandang sebagai implikasi dari ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja. Namun demikian, aliran ini meyakini bahwa mekanisme penyesuaian upah yang fleksibel berperan sebagai instrumen korektif yang mampu mengembalikan pasar menuju titik keseimbangan tenaga kerja penuh (*full employment*) (Abimayu et al., 2024). Teori Kurva Phillips menerangkan hubungan antara pengangguran dan kondisi ekonomi, di mana pengangguran yang tinggi mengindikasikan perlambatan kegiatan ekonomi serta berkurangnya daya beli masyarakat (Agustia et al., 2024). Peningkatan tingkat pengangguran terbuka berkorelasi dengan penurunan produktivitas tenaga kerja serta permintaan barang dan jasa, yang berisiko membatasi laju pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, implementasi kebijakan yang efektif dalam memitigasi tingkat pengangguran merupakan langkah krusial untuk menjamin dinamika pertumbuhan ekonomi tetap berlangsung secara berkelanjutan (Irawan et al., 2024).

H3: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diproyeksikan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia.

Bagi pendekatan teoretis ini dalam konteks ekonomi Islam, perkembangan ekonomi tidak cuma dimengerti selaku kenaikan penciptaan benda serta jasa namun pula selaku upaya buat menggapai kesejahteraan yang menyeimbangkan aspek material serta spiritual. Islam menekankan kalau tiap kegiatan ekonomi wajib mencerminkan nilai-nilai keadilan, penyeimbang, serta kesejahteraan warga. Oleh sebab itu, perkembangan ekonomi dalam Islam tidak cuma berfokus pada kenaikan pemasukan namun pula pada kesetaraan, tidak cuma semata-mata jawaban sosial yang mencukupi, serta berkah hasil bisnis (Hermanto & Ilyas, 2022).

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Serta carilah apa yang sudah Allah bagikan kepadamu (pahala) di dunia akhirat, namun janganlah kalian melupakan bagianmu di dunia ini. Berbuat baiklah (kepada sesama) sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepadamu serta janganlah kalian memunculkan kehancuran di bumi.

Sebetulnya Allah tidak menggemari orang-orang yang berbuat kehancuran.” (QS. Al-Qashash ayat 77).

Paragraf tersebut menegaskan berartinya menggapai penyeimbang antara kehidupan di Bumi serta akhirat dalam usaha ekonomi. Islam menekankan kalau kekayaan wajib diperoleh secara legal serta digunakan buat kepentingan universal, tetapi tidak melarang orang buat mengejar kekayaan serta kesuksesan. Bagi Fauza (2023), pembangunan keadilan, berkah, serta kesejahteraan sosial ialah penanda perkembangan ekonomi, di samping kenaikan pemasukan serta output. Perspektif ini tidak berubah-ubah dengan gagasan Ibn Khaldun, yang menekankan kalau nilai-nilai keadilan serta tata kelola negeri yang baik terpaut erat dengan pembangunan ekonomi. Dia berkomentar kalau walaupun pengelolaan fiskal yang tidak adil bisa membatasi kesejahteraan sosial, negeri sangat berarti dalam membangun stabilitas ekonomi serta menawarkan area yang menguntungkan untuk investasi serta aktivitas industry (Wiraputra et al., 2025).

Tidak hanya itu, sistem ekonomi Islam sangat menekankan kesejahteraan sosial. Keberhasilan ekonomi tidak cuma ditetapkan oleh kenaikan kekayaan nasional namun pula oleh pemenuhan kebutuhan pokok, penyusutan kesenjangan sosial, serta akses yang lebih besar terhadap keadilan ekonomi (Satria et al., 2024). Dengan demikian, perkembangan ekonomi dilihat dari sudut pandang Islam selaku proses pembangunan yang berfokus pada keadilan, kesejahteraan, serta keberlanjutan sembari melindungi penyeimbang antara ukuran material serta spiritual (Nasution et al., 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan paradigma kuantitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk menguji signifikansi hubungan antarvariabel penelitian. Pendekatan ini dipilih guna memfasilitasi pengukuran variabel secara numerik melalui uji statistik yang terukur. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa data panel, yang dikompilasi dari laporan resmi Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPKE), dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Lingkup penelitian mencakup 34 provinsi di Indonesia selama periode 2020–2024, sehingga menghasilkan total 170 observasi.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yakni dengan menghimpun, memverifikasi, serta melakukan pengolahan terhadap basis data publikasi dari instansi terkait yang relevan dengan variabel penelitian. Adapun analisis data dilakukan menggunakan model regresi data panel dengan dukungan perangkat lunak *EViews 9*. Proses estimasi model dilakukan melalui tiga tahapan pengujian, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Penentuan model terbaik dilakukan melalui Uji Chow untuk membandingkan CEM dan FEM, serta Uji Hausman untuk menguji pemilihan antara FEM dan REM. Tahapan sistematis ini dirancang untuk menghasilkan model estimasi yang paling akurat dalam merepresentasikan hubungan kausalitas antarvariabel yang diteliti.

Selanjutnya, untuk memastikan model regresi memenuhi kriteria *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE), dilakukan serangkaian pengujian asumsi klasik yang mencakup uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Tahapan pengujian hipotesis dilakukan melalui Uji t untuk menganalisis pengaruh parsial masing-masing variabel independen, Uji F untuk menguji signifikansi kelayakan model secara simultan, serta analisis koefisien determinasi guna mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variansi variabel dependen. Dalam penelitian ini, pertumbuhan ekonomi dikonseptualisasikan sebagai eskalasi aktivitas ekonomi regional dalam rentang waktu tertentu, yang dioperasionisasikan melalui pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Variabel tersebut merepresentasikan dinamika pertumbuhan ekonomi di setiap provinsi selama periode observasi tahun 2020–2024.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala	Rumus
Pertumbuhan Ekonomi (Y)	Pertumbuhan ekonomi yang diukur berdasarkan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan pada masing-masing provinsi di Indonesia.	Pertumbuhan PDB riil (%)	Rasio	$\frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}}$
Belanja Negara (X ₁)	Belanja negara yang diprosikan dengan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang disalurkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.	Realisasi TKDD (Miliar Rupiah)	Rasio	BN=LN(TKDD)
Investasi (PMDN) (X ₂)	Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada masing-masing provinsi di Indonesia.	Realisasi PMDN (Miliar Rupiah)	Rasio	INV=LN(PMDN)
Tingkat Pengangguran Terbuka (X ₃)	Persentase jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja pada masing-masing provinsi di Indonesia.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Rasio	$\frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Angkatan Kerja}}$

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Model regresi *data panel* dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$PE_{it} = \alpha + \beta_1 BN_{it} + \beta_2 INV_{it} + \beta_3 TPT_{it} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan

- PE_{it} = Pertumbuhan ekonomi pada provinsi ke-i dan tahun ke-t
 α = Konstanta
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi masing-masing variabel independen
BN_{it} = Belanja Negara (TKDD) pada provinsi ke-i dan tahun ke-t
INV_{it} = Investasi pada provinsi ke-i dan tahun ke-t
TPT_{it} = Tingkat Pengangguran Terbuka pada provinsi ke-i dan tahun ke-t
 ε_{it} = error term
i = cross section
t = time series

Guna menjamin validitas model penelitian, dilakukan serangkaian pengujian asumsi klasik yang mencakup uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Tahapan pengujian hipotesis selanjutnya dilaksanakan menggunakan Uji t untuk menganalisis signifikansi pengaruh parsial setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Selain itu, digunakan Uji F serta analisis Koefisien Determinasi untuk mengukur proporsi variasi variabel dependen yang mampu dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam model.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Maksimum	Minimum	Standar Deviasi
Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,96	22,94	-9,34	4,20
Belanja Negara	9,85	11,31	8,70	0,66
Investasi	9,01	11,76	5,53	1,26
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,11	10,95	1,79	1,73

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Berdasarkan pemaparan data pada Tabel 2 mengenai statistik deskriptif, terlihat bahwa masing-masing variabel riset memiliki identitas data yang bervariasi selama rentang waktu pengamatan. Variabel perkembangan pertumbuhan ekonomi (PE) berkisar dari terendah -9,34 persen sampai paling tinggi 22,94 persen, dengan rata-rata 3,96 persen. Deviasi standar sebesar 4,20 menampilkan kalau ada varians informasi yang signifikan dalam perkembangan ekonomi sepanjang periode riset. Variabel belanja negara (BN) menciptakan skor rata-rata 9,85, dengan skor minimum 8,70 serta skor maksimum 11,31. Deviasi standar sebesar 0,66 menampilkan kalau pengeluaran negeri bermacam-macam secara relatif kecil selama periode pemantauan. Tidak hanya itu, variabel investasi mempunyai rata-rata 9,01, minimum 5,53, serta paling tinggi 11,76. Informasi investasi menampilkan tingkatan volatilitas yang lumayan rendah, semacam yang ditunjukkan oleh nilai deviasi standar sebesar 0,06. Variabel tingkatan pengangguran terbuka mempunyai rata-rata 5,11 persen, minimum 1,79 persen, serta paling tinggi 10,95 persen. Pergerakan tingkatan pengangguran terbuka nampak lebih normal dibanding variabel pertumbuhan ekonomi sepanjang periode riset, semacam yang ditunjukkan oleh standar deviasi sebesar 1,73.

Tabel 3. Uji Chow

Keterangan	Prob
Cross-section F	0,000
Cross-section Chi-square	0,000

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Berdasarkan hasil Uji Chow yang disajikan pada Tabel 3, diperoleh nilai probabilitas *Cross-section F* sebesar 0,000 serta nilai probabilitas *Cross-section Chi-square* sebesar 0,000. Mengingat kedua nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, maka hipotesis nol ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Fixed Effect Model* (FEM) lebih tepat digunakan dibandingkan dengan *Common Effect Model* (CEM). Sebagai konsekuensi dari hasil tersebut, tahapan analisis selanjutnya dilanjutkan dengan Uji Hausman guna menentukan model estimasi terbaik antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM).

Tabel 4. Uji Husman

Keterangan	Prob
Cross-section random	0,000

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Berdasarkan hasil Uji Hausman yang disajikan pada Tabel 4, diperoleh nilai probabilitas (Prob.) sebesar 0,000. Mengingat nilai tersebut berada di bawah tingkat signifikansi 0,05, maka hipotesis nol ditolak, yang mengindikasikan bahwa *Fixed Effect Model* (FEM) lebih konsisten dan tepat dibandingkan dengan *Random Effect Model* (REM). Sejalan dengan temuan tersebut, *Fixed Effect Model* (FEM) ditetapkan sebagai model estimasi terbaik yang digunakan dalam analisis regresi data panel untuk menjawab tujuan penelitian ini.

Tabel 5. Multikolineritas

Variabel	Belanja Negara	Investasi	Tingkat Pengangguran Terbuka
Belanja Negara	1,000	0,616	0,236
Investasi	0,616	1,000	0,340
Tingkat Pengangguran Terbuka	0,236	0,340	1,000

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang disajikan pada Tabel 5, diketahui bahwa nilai korelasi antarvariabel independen berada pada level yang aman. Secara rinci, pertama, nilai korelasi antara Belanja Negara (BN) dan Investasi (INV) adalah sebesar 0,616. Kedua, korelasi antara Belanja Negara (BN) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 0,236. Ketiga, korelasi antara Investasi (INV) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 0,340. Mengingat seluruh nilai koefisien korelasi antarvariabel independen tersebut berada di bawah ambang batas kritis 0,80, maka dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini terbebas dari gejala multikolinearitas. Dengan demikian, variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan layak dan valid untuk diestimasi dalam model regresi data panel.

Tabel 6. Hasil Pengujian

Keterangan	Nilai DW	Prob F
Uji Heteroskedastisitas	-	0,000
Uji Autokorelasi	1,90	-

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas yang disajikan pada Tabel 6, diperoleh nilai probabilitas F sebesar 0,00. Mengingat nilai tersebut berada di bawah tingkat signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model penelitian mengandung gejala heteroskedastisitas atau belum memenuhi asumsi homoskedastisitas. Untuk mengatasi masalah tersebut, dilakukan penyesuaian model menggunakan *Heteroskedasticity Consistent Covariance* (HAC) dengan metode *White Cross-section*. Selain itu, pengujian autokorelasi menggunakan nilai *Durbin-Watson* menunjukkan angka yang berada dalam rentang 1,70 hingga 2,40. Hal ini mengindikasikan bahwa model penelitian terbebas dari masalah autokorelasi, sehingga model dinyatakan valid secara statistik.

Berdasarkan tahapan prosedur seleksi model data panel yang telah dilaksanakan, estimasi regresi dalam penelitian ini ditetapkan menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM). Keputusan ini didasarkan pada hasil Uji Chow dan Uji Hausman yang secara konsisten menunjukkan bahwa model FEM merupakan estimator yang paling tepat dibandingkan dengan model lainnya. Pemilihan FEM mengindikasikan adanya perbedaan karakteristik atau intersep antarprovinsi yang bersifat spesifik dan tidak acak. Dengan mengaplikasikan FEM, model penelitian mampu mengakomodasi heterogenitas individu (*cross-section*) yang tidak terobservasi (*unobserved heterogeneity*) namun cenderung konstan sepanjang waktu, sehingga estimasi yang dihasilkan menjadi lebih konsisten dan *robust*. Hasil estimasi regresi data panel menggunakan pendekatan FEM disajikan secara lengkap pada Tabel 7 berikut:

Tabel 7. Hasil uji Regresi data Panel Fixed Effect Model

Variabel	Koefisien	Prob.
Konstanta	4,14	0,877
Belanja Negara	0,34	0,889
Investasi	0,98	0,267
Tingkat Pengangguran Terbuka	-2,42	0,000
Adjusted R Square	0,560	-
Uji F	-	0,000

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

$$PE_{it} = 4,14 + 0,34 BN_{it} + 0,98 INV_{it} - 2,42 TPT_{it} + \sum_{n=4}^{34} \beta_n i_{n-4} \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan

PE_{it} = Pertumbuhan ekonomi pada provinsi ke-i dan tahun ke-t

BN _{it}	= Belanja Negara (TKDD) pada provinsi ke-i dan tahun ke-t
INV _{it}	= Investasi pada provinsi ke-i dan tahun ke-t
TPT _{it}	= Tingkat Pengangguran Terbuka pada provinsi ke-i dan tahun ke-t
β_n	= koefisien masing-masing perusahaan
i	= cross section
t	= time series

Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) pada Tabel 7, diperoleh hasil analisis sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil estimasi regresi, nilai konstanta penelitian menunjukkan hasil yang tidak signifikan secara statistik. Ketidaksignifikanan konstanta ini memberikan implikasi bahwa ketika seluruh variabel independen, yaitu Belanja Negara (BN), Investasi (INV), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diasumsikan bernilai nol, maka pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi tidak memiliki nilai dasar yang signifikan secara statistik.
2. Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel, variabel Belanja Negara (BN) menunjukkan koefisien yang tidak signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi (probabilitas > 0,05). Hasil ini mengindikasikan bahwa selama periode pengamatan 2020–2024, perubahan volume Belanja Negara di tingkat provinsi tidak memberikan dampak yang berarti terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi regional.
3. Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel, variabel Investasi (INV) menunjukkan koefisien yang tidak signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi (probabilitas > 0,05). Temuan ini mengindikasikan bahwa selama periode observasi 2020–2024, perubahan arus investasi, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun modal lainnya di tingkat provinsi, belum mampu memberikan dorongan yang signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi regional.
4. Hasil estimasi regresi data panel menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara statistik, koefisien variabel TPT menunjukkan bahwa penurunan TPT sebesar 1% diikuti oleh penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,42%.

Berdasarkan hasil uji kelayakan model (*Uji F*) yang disajikan pada Tabel 7, diperoleh nilai probabilitas F-statistik sebesar 0,000. Mengingat nilai tersebut berada di bawah tingkat signifikansi 0,05, dapat disimpulkan bahwa secara simultan seluruh variabel independen dalam model memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dinyatakan layak (*fit*) dan valid untuk menjelaskan hubungan kausalitas antarvariabel penelitian. Selanjutnya, hasil analisis koefisien determinasi yang ditunjukkan oleh nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,560 memberikan implikasi bahwa 56% variasi pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variabel Belanja Negara, Investasi, dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Adapun sisanya, yakni sebesar 44%, dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar cakupan model penelitian ini. Secara keseluruhan, model yang diestimasi memiliki daya penjelas (*explanatory power*) yang cukup baik dalam memetakan dinamika pertumbuhan ekonomi selama periode observasi.

Pengaruh Belanja Negara terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2020-2024

Hasil estimasi regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) menunjukkan bahwa variabel belanja negara, yang diprosikan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 34 provinsi Indonesia selama periode 2020–2024. Temuan ini mengindikasikan bahwa hipotesis yang menyatakan belanja negara berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi tidak dapat diterima. Secara

teoretis, pengeluaran pemerintah merupakan instrumen kebijakan fiskal krusial untuk menstimulasi aktivitas ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, perluasan layanan publik, pemberian subsidi, serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Idealnya, peningkatan belanja pemerintah akan mendorong permintaan agregat, memperkuat daya beli masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan pada akhirnya memacu pertumbuhan ekonomi. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan nominal TKDD di Indonesia selama periode pengamatan belum mampu memberikan efek stimulasi yang signifikan terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi regional.

Dalam perspektif ekonomi Islam, pengelolaan pengeluaran pemerintah tidak hanya dipandang sebagai alat kebijakan fiskal, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara inklusif. Hal ini selaras dengan penegasan dalam QS. Al-Hasyr ayat 7, yang mengamanatkan bahwa harta tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya (*aghniya'*). Dengan demikian, prinsip keadilan distributif dalam ekonomi Islam menuntut agar alokasi belanja negara dikelola secara efektif dan tepat sasaran. Fokus utama kebijakan belanja pemerintah seharusnya tidak sekadar pada peningkatan volume anggaran, melainkan pada optimalisasi alokasi yang mampu mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas, dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

Kesimpulan riset ini tidak berubah-ubah dengan riset Huwaida et al. (2023) serta Parasan et al. (2023), yang merumuskan kalau pengeluaran pemerintah mempunyai akibat yang menguntungkan tetapi bisa diabaikan terhadap perkembangan ekonomi. Riset kedua menegaskan kalau donasi negeri belanja terhadap pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh daya guna pengelolaan anggaran. Tidak hanya itu, riset Nur & Naldi (2016) menampilkan kalau negeri belanja mempunyai akibat yang menguntungkan terhadap pembangunan ekonomi lewat kenaikan investasi serta mengkonsumsi, sedangkan akibatnya belum substansial dalam jangka pendek. Bagi penemuan riset, pengeluaran negeri belum mempunyai akibat substansial terhadap pembangunan ekonomi (Adrian et al., 2024). Hasil estimasi penelitian ini mengindikasikan bahwa masih terdapat faktor-faktor eksogen di luar model yang memiliki peran signifikan terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi perlunya peningkatan efektivitas dan kualitas pengelolaan anggaran negara di masa depan. Secara empiris, Belanja Negara yang diprosikan dengan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) menunjukkan pengaruh tidak signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini memberikan pesan kebijakan yang krusial: efektivitas, efisiensi, dan kualitas tata kelola anggaran (*quality of spending*) menjadi variabel yang jauh lebih determinan bagi pertumbuhan ekonomi dibandingkan sekadar peningkatan volume atau nominal belanja pemerintah. Oleh karena itu, penguatan akuntabilitas dan ketepatan alokasi anggaran daerah menjadi prasyarat mutlak untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang lebih berdampak bagi masyarakat.

Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia tahun 2020-2024

Hasil estimasi regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) menunjukkan bahwa variabel investasi memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 34 provinsi Indonesia selama periode 2020–2024. Temuan ini mengindikasikan bahwa hipotesis yang menyatakan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi tidak dapat diterima secara empiris. Hasil ini mencerminkan adanya diskoneksi antara teori ekonomi konvensional dengan realitas lapangan yang terjadi selama periode observasi. Dalam teori pertumbuhan ekonomi klasik dan neoklasik, investasi dipandang sebagai mesin utama pendorong akumulasi modal dan produktivitas. Namun, dalam konteks regional di Indonesia, peningkatan realisasi investasi belum secara otomatis memicu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Secara teoretis, teori Harrod-Domar dan Neo-Klasik menempatkan investasi sebagai faktor kunci dalam mengakumulasi

modal dan memperluas kapasitas produksi guna mendongkrak ekonomi. Lebih lanjut, temuan yang menunjukkan tidak adanya signifikansi statistik antara investasi dan pertumbuhan ekonomi mengonfirmasi kekhawatiran teoretis bahwa hubungan antara penanaman modal dan pertumbuhan ekonomi tidak selalu bersifat linear dalam kondisi nyata. Hasil ini juga didukung oleh Huwaida et al. (2023) serta riset Ganar et al. (2021).

Ketidaksignifikanan ini berakar pada beberapa kendala krusial, di mana efektivitas investasi sangat bergantung pada kualitas pengelolaan serta kemampuan daerah dalam menyerap dan mengarahkan modal ke sektor-sektor riil yang produktif. Ketika investasi tidak dikelola dengan tata kelola yang baik atau tidak terdistribusi secara merata, maka suntikan modal tersebut gagal menciptakan efek pengganda yang diperlukan untuk memacu aktivitas ekonomi secara substansial. Kondisi ini mencerminkan fluktuasi pertumbuhan ekonomi yang rentan terhadap tantangan pembangunan nasional, di mana keberhasilan ekonomi tidak cukup hanya dicapai melalui akumulasi modal semata. Dalam perspektif ekonomi Islam yang juga menjadi kerangka penelitian, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus melampaui orientasi peningkatan output material. Ketidaksignifikanan investasi tersebut menekankan perlunya pengelolaan zona ekonomi yang lebih produktif dan berkeadilan, di mana investasi harus mampu menciptakan kemaslahatan nyata bagi masyarakat luas melalui tata kelola yang efektif. Dengan demikian, temuan ini mempertegas bahwa keberhasilan ekonomi Indonesia membutuhkan dukungan kebijakan yang lebih dari sekadar injeksi modal, melainkan integrasi antara kualitas sumber daya, efektivitas penggunaan anggaran, dan penciptaan lapangan kerja yang berorientasi pada kesejahteraan bersama

Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2020-2024

Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel, variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan koefisien negatif sebesar -2,42 terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai probabilitas yang diperoleh sebesar 0,000, yang berada jauh di bawah tingkat signifikansi 0,05, mengindikasikan bahwa variabel TPT memiliki pengaruh negatif dan signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama periode pengamatan 2020–2024. Temuan ini memberikan penegasan empiris bahwa peningkatan tingkat pengangguran cenderung mengakibatkan perlambatan pada laju pertumbuhan ekonomi regional. Secara teoretis, hubungan ini selaras dengan Hukum Okun (*Okun's Law*), yang menyatakan bahwa terdapat keterkaitan terbalik antara tingkat pengangguran dan output ekonomi. Dalam konteks ini, pengangguran yang tinggi merepresentasikan hilangnya potensi produktivitas tenaga kerja yang seharusnya dapat berkontribusi pada penciptaan nilai tambah (PDRB). Secara teori, pengangguran ialah permasalahan makroekonomi yang bisa membatasi perluasan ekonomi sebab minimnya pemanfaatan angkatan kerja. Terdapat mungkin penyakit ini hendak merendahkan pemasukan publik serta energi beli, yang menimbulkan kegiatan mengkonsumsi serta output menyusut. Temuan penelitian ini selaras dengan dalil Hukum Okun, yang menjelaskan bahwa fluktuasi pengangguran memiliki pengaruh yang berlawanan arah atau bersifat menghambat terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara penurunan tingkat pengangguran mampu mendorong peningkatan output nasional dan pembangunan ekonomi, kenaikan tingkat pengangguran justru akan menyebabkan kontraksi pada output nasional.

Dari sudut pandang ekonomi Islam, bekerja merupakan ibadah yang berguna serta metode yang legal buat penuhi kebutuhan hidup. Perihal ini cocok dengan Surah At-Taubah, ayat 105, yang berbunyi, Serta katakanlah: Bekerjalah, hingga Allah hendak memandang pekerjaanmu. Oleh sebab itu, mengoptimalkan pemanfaatan tenaga kerja serta produktivitas kerja sangat berarti buat tingkatkan kesejahteraan sosial serta mendesak kemakmuran ekonomi. Penemuan riset ini diperkuat oleh riset

Saputra & Soebagiyo (2024) yang menarangkan gimana pengangguran mempunyai akibat substansial serta merugikan terhadap perkembangan ekonomi. Kenaikan pengangguran berpotensi kurang pemasukan warga serta keluarga konsumen, yang bisa membatasi pembangunan ekonomi, bagi riset. Riset Sitorus et al. (2025) lebih lanjut menunjang penemuan ini, menampilkan kalau pengangguran secara signifikan serta negatif mempengaruhi perkembangan ekonomi. Penciptaan ekonomi serta produktivitas pekerja bisa bertambah bersamaan dengan penyusutan tingkatan pengangguran. Keadaan ini secara empiris diakibatkan oleh minimnya kesempatan kerja, penyerapan tenaga kerja yang tidak mencukupi, serta ketidakseimbangan antara pekerja serta lapangan kerja yang ada. Perihal ini menimbulkan penyusutan kapasitas penciptaan kala pekerja tertentu tidak terserap. Dampaknya, teruji kalau pengangguran secara signifikan serta negatif mempengaruhi pembangunan ekonomi Indonesia. Suasana ini menampilkan kalau mempertahankan pembangunan ekonomi nasional tergantung pada pengendalian tingkatan pengangguran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil estimasi penelitian ini menunjukkan bahwa belanja negara, yang diprosikan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), belum mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 34 provinsi Indonesia sepanjang periode 2020–2024. Temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas serta kualitas tata kelola anggaran (*quality of spending*) merupakan faktor yang jauh lebih krusial dibandingkan sekadar besarnya alokasi nominal belanja. Di sisi lain, investasi melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terbukti tidak memberikan kontribusi yang signifikan, yang menandakan bahwa penguatan modal secara efektif belum berhasil mendorong perluasan kapasitas produksi dan penciptaan lapangan kerja bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi; penurunan produktivitas tenaga kerja akibat tingginya angka pengangguran berimplikasi pada pelemahan daya beli masyarakat serta hambatan dalam laju pembangunan ekonomi.

Berdasarkan temuan penelitian, pemerintah disarankan untuk upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara sistematis guna menekan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang terbukti menjadi faktor penghambat laju pertumbuhan ekonomi nasional. Terakhir, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan variabel makroekonomi yang diuji serta memperpanjang durasi periode observasi, sehingga analisis mengenai dinamika pertumbuhan ekonomi nasional dapat menghasilkan kesimpulan yang lebih komprehensif dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimayu, A., Salsabila, D., Anriyani, Y., & Kurniawan, M. (2024). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Pajak Dan Analisis Ekonomi Syariah (JPAES)*, 1(3), 82–98.
- Adrian, Hadrah, & Rajiman, W. (2024). PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA PALOPO. *COSTING: Journal of Economic, Bussines and Accounting*, 7(6), 10790–10798. <https://doi.org/10.31539/costing.v8i1.14104>
- Agustia, S., Hastuty, S. C., Rahmawati, V., & Kurniawan, M. (2024). Analisis Pengaruh Inflansi, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Diprovinsi Lampung (2013-2022). *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 2(3), 94–108. <https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v2i3.902>
- Amdan, L., & Sanjani, M. R. (2023). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(1), 108–119. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i1.2089>

- Amin, S. Bin, Samia, B. I., & Khan, F. (2024). Does capital efficiency influence economic growth in Bangladesh? Application of the Harrod-Domar model. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, 29(58), 326–345.
- Ananda, G. A. K., Huda, N., Marlina, M., & Kurniawan, M. (2024). Pengaruh Bonus Demografi Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Lampung Periode 2014-2023. *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(3), 185–197. <https://doi.org/10.61132/santri.v2i3.611>
- Damanik, P., & Damanik, D. (2023). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi. *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS EKONOMI*, 1(3), 80–86. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v1i3.303>
- Dewi, K. D. P., & Setiawina, N. D. (2023). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 13, 1427–1442. <https://doi.org/10.24843/eeb.2024.v13.i07.p12>
- Dumo, G. A., Ico, H. D., & Magpantay, E. V. (2023). Applicability of Harrod-Domar model in explaining economic growth in the Philippines. *Journal of Economics, Finance, and Accounting Studies*, 5(3), 22.
- Fauza, M. (2023). Implementasi Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam Dalam Aktivitas Ekonomi. *Mumtaz: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 85–91. <https://doi.org/10.55537/mumtaz.v2i2.602>
- Ganar, Y. B., Zulfitri, Z., & Sampurnaningsih, S. R. (2021). Pengaruh Nilai Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1999-2019. *Jurnal Disrupsi Bisnis: Jurnal Ilmiah Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang*, 4(1), 44–52. <https://doi.org/10.32493/drj.v4i1.9120>
- Hermanto, H., & Ilyas, R. (2022). Prinsip dasar sistem ekonomi Islam. *EDUGAMA: Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2(1), 297–316. <https://doi.org/10.32923/edugama.v7i1.2201>
- Hutahaean, P. (2019). Belanja Negara dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Analisis Kointegrasi dan Kausalitas. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 3(2), 103–115. <https://doi.org/10.31685/kek.v3i2.411>
- Huwaida, N., Ufairah, U., & Wahyudi, R. (2023). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Pembiayaan Bank Syariah terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pada Tahun 2016-2020. *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 18(1), 1–12. <https://doi.org/10.31942/akses.v18i1.8591>
- Inayah, I. (2023). Pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 2(4), 149–169. <https://doi.org/10.55606/jekombis.v2i4.2543>
- Irawan, I., Raysharie, P. I., Tesalonika, T., Septianingsih, D., Samman, M., Satrio, M., Sari, N., Nisa, S. P., & Zulkarnain, Z. (2024). Pengaruh Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Nian Tana Sikka: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 98–106. <https://doi.org/10.59603/niantanasikka.v2i1.258>
- Iriawan, T., & Usaid, P. Y. (2026). Mediation Model of BPK Recommendation Follow-Ups on Local Government Financial Performance In South Kalimantan. *Keizai*, 6(2), 359–377.
- Kusuma, A. F., & Anwar, A. (2023). Analisis ketergantungan fiskal daerah dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 2(2), 223–233. <https://doi.org/10.20885/JKEK.vol2.iss2.art14>
- Kusuma, D. P. V., & Purnomo, D. (2024). Analisis pengaruh variabel makroekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2017-2022. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 4(1), 92–102. <https://doi.org/10.53088/jerps.v4i1.860>
- Lubis, A. K., Hisan, S. K., & Zein, A. W. (2025). Analisis Pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Moneter : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 3(3), 95–104.
- Manullang, R. R., Nasution, A. A., Nasution, A. A., Syofya, H., & Haeril, H. (2024). Analisis Pengaruh Investasi Asing Dan Investasi Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8(2), 1–12. <https://doi.org/10.29040/jie.v8i2.13133>

- Martinus, T., & Budiman, J. (2024). Analisis Pengaruh Ekspor, Impor, Kurs, Investasi, dan Belanja Negara Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 5(3), 564–571. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v5i3.4728>
- Nasution, E. O. A. B., Nasution, L. P. L., Agustina, M., & Tambunan, K. (2023). Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam. *Journal of Management and Creative Business*, 1(1), 63–71. <https://doi.org/10.30640/jmcbus.v1i1.484>
- Neno, R. A., Saleh, S. E., Dai, S. I. S., & Mulyati, Y. (2024). Pengaruh Pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kawasan Teluk Tomini 2017-2021. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(3), 84–101. <https://doi.org/10.37905/jsep.v1i3.23493>
- Nur, M., & Naldi, N. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kiat*, 27(1), 16–26. [https://doi.org/10.25299/kiat.2016.vol26\(1\).3018](https://doi.org/10.25299/kiat.2016.vol26(1).3018)
- Parasan, P. M., Opod, C. R., & Tooy, S. M. (2023). Analisis Belanja Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Mianahasa. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 2(3), 160–169. <https://doi.org/10.59086/jam.v2i3.429>
- Pitri, A., Murtala, M., Abbas, T., & Saharuddin, S. (2024). Pengaruh Tingkat Inflasi, Investasi Dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Beberapa Negara Asia Tenggara. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 7(1), 29–40. <https://doi.org/10.29103/jeru.v7i1.17762>
- Sadli, M., Mallongi, S., & Zakaria, J. (2022). Analisis pengaruh belanja negara dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Journal of Accounting and Finance (JAF)*, 3(2), 30–45. <https://doi.org/10.52103/jaf.v3i2.931>
- Saputra, S. E., & Soebagiyo, D. (2024). Pengaruh Investasi, Tingkat Pengangguran, dan APDB Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali 2020-2023. *Of Economic, Business and Accounting*, 7(4), 662–671. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i5.11402>
- Satria, A. D., Ridwansyah, R., & Habibi, A. (2023). Pengaruh Sektor Produk Domestik Regional Bruto (Basis dan Non Basis) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1213–1226. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7995>
- Satria, A., Shifa, M., & Ariani, D. (2024). Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal El Rayyan: Jurnal Perbankan Syariah*, 3(1), 53–59. <https://doi.org/10.59342/jer.v3i1.525>
- Septiana, N., Amirullah, M., & Mumtahaen, I. (2023). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA PERIODE 2002 – 2021. *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(4), 610–620. <https://doi.org/10.572349/mufakat.v2i4.946>
- Shabira, H., & Amri, K. (2023). Pengaruh Ekspor dan Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *JURNAL EKONOMI MANAJEMEN DAN SEKRETARI*, 8(1), 31–42. <https://doi.org/10.35870/jemensri.v8i1.3035>
- Sitorus, M. C., Ginting, F. H., Sirait, K. D., & Sigalingging, R. E. (2025). Pengaruh investasi dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(6). <https://doi.org/10.62281/v3i6.2025>
- Sulistiawati, R. (2012). Pengaruh investasi terhadap pertumbuhan Ekonomi dan penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan masyarakat di Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 3(1), 29–50.
- Tambunan, C., & Amin, J. (2019). Dampak Belanja Negara Terhadap Tingkat Kegiatan Ekonomi di Indonesia. *Media Ekonomi*, 27(1), 53–70. <https://doi.org/10.25105/me.v27i1.5303>
- Tasmilah, T. (2021). Pengaruh belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja formal di Indonesia. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 2(2), 92–112. <https://doi.org/10.26905/jrei.v2i2.7220>
- Wiraputra, J., Sari, O., Andriani, Y., & Ridwansyah, R. (2025). Ekonomi Islam dalam Pandangan Ibnu Khaldun. *Jurnal Sains, Sosial, Dan Studi Agama*, 1(8), 919–929.
- Yunita, Y., & Putri, R. (2026). Unemployment, Education, Health, and Poverty in Indonesia: Islamic Perspective. *Keizai*, 7(1), 40–59.
- Zaharani, A. Z., & Nasir, M. (2025). Pengaruh investasi dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 15(01), 1–14.

<https://doi.org/10.56196/jta.v15i01.423>